

PENGADILAN TINGGI MANADO

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PENGADILAN TINGGI MANADO





**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tinggi Manado
Tahun 2026**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Manado dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2026 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	96%	96%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	99%	99%	99%	99%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	97%	97%	97%
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	97%	97%	97%
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	94%	94%	94%	94%

No.	Aksi	Jadwal (Triwulan)				Output	Outcome	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
1.1.	Indikator : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu							Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	399.006.000
	a.Tahap Perencanaan : - Menetapkan Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana dan Perdata, Susunan Majells Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi, Susunan Majelis Hakim Perkara Pemilu, Susunan Majells Hakim Perkara Anak dan Susunan Majelis Hakim Perkara Lingkungan pada Pengadilan Tinggi Manado. - Menetapkan Susunan Panitera Pengganti untuk Majells Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado. - Menetapkan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada Pengadilan Tinggi Manado. b.Tahap Pelaksanaan : Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31	I	II	III	IV	a.Jumlah perkara yang diselesaikan secara tepat waktu; b.Putusan yang telah diucapkan dan dicatat secara resmi dalam SIPP; dan c.Laporan keadaan perkara.	a.Terwujudnya efektivitas peradilan karena proses penyelesaian perkara berjalan tepat waktu; b.Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas peradilan; c.Terwujudnya peradilan yang responsif karena kebutuhan pencari keadilan terhadap kepastian waktu penyelesaian perkara dapat dipenuhi secara konsisten; dan d.Terwujudnya peradilan yang modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara.			

	Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.																		
	c. Tahap Pengawasan : Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyelesaian perkara oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado.																		
1.2.	Indikator : Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju										Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
	a. Tahap Perencanaan : - Menetapkan Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana dan Perdata, Susunan Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi, Susunan Majelis Hakim Perkara Pemilu, Susunan Majelis Hakim Perkara Anak dan Susunan Majelis Hakim Perkara Lingkungan pada Pengadilan Tinggi Manado. - Menetapkan Susunan Panitera Pengganti untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado. - Menetapkan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada Pengadilan Tinggi Manado. b. Tahap Pelaksanaan : Melaksanakan pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada pengadilan pengaju sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012				I	II	III	IV	Salinan putusan yang telah ditandatangani dan dikirimkan secara tepat waktu kepada pengadilan pengaju	a. Meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara; b. Terjaganya transparansi karena putusan dapat segera diakses dan ditindaklanjuti; dan c. Meningkatnya akuntabilitas lembaga peradilan melalui kepastian prosedur dan waktu layanan.									

	tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).											
	c. Tahap Pengawasan : Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado terhadap realisasi waktu pengiriman salinan putusan.											
1.3.	Indikator : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan										Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	a. Tahap Perencanaan : Penunjukan penanggung jawab pada Unit Kepaniteraan terkait pengunggahan putusan pengadilan pada direktori putusan. b. Tahap Pelaksanaan : Pengunggahan putusan dilakukan segera setelah putusan selesai diminutasi dan dinyatakan siap publikasi. c. Tahap Pengawasan : Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado terhadap realisasi pengunggahan putusan.	I	II	III	IV	Basis data putusan yang dikelola dan terdokumentasi secara sistematis dalam direktori putusan	a. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan; b. Terjaganya konsistensi penerapan hukum; dan c. Mendukung modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.					
1.4.	Indikator : Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court										Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	a. Tahap Perencanaan : - Rencana sosialisasi kepada pengadilan tingkat pertama dan pengguna layanan, terutama advokat mengenal	I	II	III	IV	Jumlah dan persentase perkara perdata banding yang didaftarkan melalui e-	a. Meningkatnya efisiensi dan kepastian proses administrasi perkara banding;					

kewajiban dan manfaat pengajuan perkara banding melalui <i>e-Court</i>. - Penguatan kapasitas aparaturnya tentang pengelolaan administrasi perkara banding berbasis elektronik. b. Tahap Pelaksanaan : - Difokuskan pada optimalisasi penggunaan <i>e-Court</i> dalam proses administrasi perkara banding. - Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado menyampaikan arahan bahwa permohonan banding perdata diarahkan menggunakan <i>e-Court</i>, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dibuktikan. - Panitera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah perkara banding perdata yang masuk dan berapa yang menggunakan <i>e-Court</i>. - Panitera melakukan pembinaan secara berkala kepada Panitera Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado agar setiap perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding diarahkan menggunakan <i>e-Court</i> sejak tahap awal, sesuai dengan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022. c. Tahap Pengawasan :				<i>Court</i> dibandingkan dengan total perkara banding perdata yang masuk.	b. Mempercepat alur administrasi perkara; dan c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas layanan.				
---	--	--	--	---	---	--	--	--	--

	Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait data perkara banding dalam aplikasi <i>e-Court</i> . Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan cepat, seperti penyesuaian prosedur layanan atau peningkatan intensitas sosialisasi. Pengawasan juga mencakup kualitas input data dan ketepatan waktu proses administrasi agar penggunaan <i>e-Court</i> tidak hanya bersifat formal tetapi juga berdampak pada percepatan penyelesaian perkara.								
1.5.	Indikator : Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>							Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	a.Tahap Perencanaan : - Penguatan kapasitas aparatur tentang pengelolaan administrasi perkara banding berbasis elektronik. b.Tahap Pelaksanaan : - Difokuskan pada optimalisasi penggunaan <i>e-Berpadu</i> dalam proses administrasi perkara banding. - Kendala teknis yang muncul dicatat dan ditindaklanjuti segera agar tidak menghambat proses. - Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado menyampaikan arahan bahwa permohonan banding pidana diarahkan menggunakan <i>e-Berpadu</i>, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dibuktikan.	I	II	III	IV	Jumlah dan persentase perkara pidana banding yang didaftarkan melalui <i>e-Berpadu</i> dibandingkan dengan total perkara banding pidana yang masuk	a.Meningkatnya efisiensi dan kepastian proses administrasi perkara banding. b.Penggunaan <i>e-Berpadu</i> mempercepat alur administrasi. c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas layanan.		

- Panitera melakukan pengecekan sederhana terhadap jumlah perkara banding pidana yang masuk dan berapa yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>. - Panitera melakukan pembinaan secara berkala kepada Panitera Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado agar setiap perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding diarahkan menggunakan <i>e-Berpadu</i> sejak tahap awal, sesuai dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022. c. Tahap Pengawasan : Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait data perkara banding dalam aplikasi <i>e-Berpadu</i>. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan cepat, seperti penyesuaian prosedur layanan atau peningkatan intensitas sosialisasi. Pengawasan juga mencakup kualitas input data dan ketepatan waktu proses administrasi agar penggunaan <i>e-Berpadu</i> tidak hanya bersifat formal tetapi juga berdampak pada percepatan penyelesaian perkara.																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,64	3,64	3,64	3,64

No.	Aksi	Jadwal (Triwulan)				Output	Outcome	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
2.1.	Indikator : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan									
	a. Tahap Perencanaan : - Menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTSP serta Penunjukan Tim Pelaksana PTSP pada Pengadilan Tinggi Manado; - Menetapkan Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Harian pada Pengadilan Tinggi Manado; - Membuat jadwal <i>briefing</i> dan pengawasan secara berkala terhadap Tim Pelaksana PTSP pada Pengadilan Tinggi Manado; - Rencana penetapan Petugas PTSP Terbaik pada Pengadilan Tinggi Manado secara periodik; dan - Menyiapkan instrumen survei yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan.	I	II	III	IV	a. Data Indeks Kepuasan Masyarakat yang valid dan terdokumentasi; b. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan c. Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	a. Meningkatnya tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap layanan pengadilan; b. Meningkatnya kualitas pelayanan pengadilan yang tercermin dari kenaikan nilai indeks kepuasan pada periode berikutnya; c. Terwujudnya budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan; dan d. Meningkatnya akuntabilitas dan responsivitas satuan kerja pengadilan dalam memberikan layanan publik.	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	29.000.000

b. Tahap Pelaksanaan : - Melaksanakan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan pengadilan; - Mengumpulkan dan mengolah data survei secara objektif dan terukur; - Mengidentifikasi unsur layanan yang belum memenuhi standar berdasarkan hasil survei; - Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah; dan c. Tahap Pengawasan : - Melaksanakan <i>briefing</i> dan pengawasan secara berkala terhadap Tim Pelaksana PTSP pada Pengadilan Tinggi Manado; - Membuat Laporan Pengawasan Bidang PTSP; - Membuat Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan - Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan peningkatan layanan.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	72			
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90			
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00			

No.	Aksi	Jadwal (Triwulan)	Output	Outcome	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
3.1.	Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan						
	a. Tahap Perencanaan : - Menetapkan target IP ASN satuan kerja Pengadilan Tinggi Manado; - Melakukan pemetaan kondisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin; dan - Membuat usulan atas setiap pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran mandiri, dan penugasan. b. Tahap Pelaksanaan : - Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran mandiri, dan penugasan; - Melaksanakan penilaian kinerja ASN secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku;	Tahunan	a. Nilai IP ASN satuan kerja Pengadilan Tinggi Manado yang dihitung berdasarkan data kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, hasil penilaian kinerja, dan data disiplin ASN; dan b. Basis data ASN yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perhitungan IP ASN.	a. Meningkatnya tingkat profesionalitas ASN pengadilan secara terukur dan berkelanjutan; b. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan akuntabel; c. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi; dan d. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap manajemen aparatur di lingkungan pengadilan.	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	58.752.000 21.960.161.000

	- Menegakkan disiplin ASN melalui penerapan aturan dan pembinaan berkelanjutan; dan - Melaksanakan pengisian dan pemutakhiran data ASN secara berkala pada Aplikasi SIKEP dan ASN DIGITAL (MyASN). c. Tahap Pengawasan : - Melakukan monitoring terhadap capaian setiap dimensi IP ASN secara periodik; - Menyampaikan hasil monitoring kepada Pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis di bidang manajemen aparatur.									
3.2.	Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan									
	a. Tahap Perencanaan : - Menyusun rencana kerja dan anggaran yang selaras antara target output, kebutuhan biaya, dan jadwal pelaksanaan; - Menyusun rencana penarikan dana per bulan; - Menyusun rencana penarikan dana per triwulan; - Pengadaan, kontrak, dan jadwal pembayaran disiapkan sejak awal tahun untuk mencegah keterlambatan; - Pejabat pengelola keuangan ditetapkan secara jelas beserta pembagian tugas verifikasi, pengujian, dan pencairan. b. Tahap Pelaksanaan : - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, menyelesaikan tagihan tepat	I	II	III	IV	a. Nilai IKPA; dan b. Data realisasi anggaran yang akurat dan mutakhir dalam sistem perbendaharaan negara.	a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran; b. Meningkatnya akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

	waktu, mengelola uang persediaan sesuai batas waktu pertanggungjawaban; - Melakukan pemantauan melalui aplikasi perbendaharaan untuk memastikan deviasi antara rencana dan realisasi tetap terkendali; dan - Melaksanakan rapat evaluasi bulanan untuk membahas capaian serapan, kendala kegiatan, dan langkah-langkah perbaikan. c. Tahap Pengawasan : - Monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Myintress; dan - Monitoring dan evaluasi anggaran per triwulan antara Pejabat Pengelola Keuangan, Panitera, Para Panitera Muda serta Para Kepala Sub Bagian.							
3.3. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran								
a. Tahap Perencanaan : - Menetapkan target Rincian Ouput; dan - Menetapkan target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran b. Tahap Pelaksanaan : Melakukan pemantauan secara berkala melalui Aplikasi Monev. c. Tahap Pengawasan :	Tahunan	a. Capaian keluaran perencanaan anggaran; b. Efisiensi penggunaan anggaran per unit keluaran; dan c. Dokumentasi dan kelengkapan data perencanaan di sistem Monev.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja di mana anggaran yang direncanakan dapat menghasilkan kegiatan yang relevan dan berguna.	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		

	Menyusun dashboard kinerja triwulanan yang memuat persentase capaian output, penyerapan anggaran, dan rasio biaya per unit output.					
3.4.	Indikator : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan					
	a. Tahap Perencanaan : Pemetaan kondisi seluruh BMN baik secara fisik maupun administrasi. b. Tahap Pelaksanaan : Melakukan pencatatan setiap transaksi perolehan, pemindahan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara tepat waktu dalam sistem. c. Tahap Pengawasan : - Monitoring secara berkala atas kesesuaian data fisik dan administrasi, pemeriksaan internal, serta tindak lanjut atas temuan audit (jika ada); dan - Penyusunan Laporan Wasdal Semester I dan Tahunan.	Tahunan	a. Data aset yang lengkap, akurat dan terbaru dalam aplikasi penatausahaan BMN; dan b. Inventarisasi fisik secara berkala, rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan laporan keuangan.	a. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan aset untuk mendukung operasional peradilan; dan b. Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan serta optimalnya penggunaan aset negara melalui pemeliharaan, pemanfaatan, atau penghapusan yang tepat.	Dukungan Manajemen	Dukungan Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Manado, 7 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Manado



AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H. 

